

PERAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TERHADAP PENGENDALIAN BANJIR DI SAMARINDA

Mubarak¹, Prof. Dr. H. Adam Idris, M.Si², Dr. Anwar Alaydrus, S.Sos,
M.M.³

Abstrak

Peran adalah proses merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi keputusan kebijakan, proses Peran dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan telah ditetapkan dalam bentuk program-program yang telah ditetapkan. Untuk memperoleh hasil seperti yang diharapkan dalam proses pengambilan keputusan perlu melibatkan berbagai unsur, sehingga hasil keputusan akan melahirkan suatu produk kebijakan yang mewakili semua kepentingan. Peran kebijakan tidak selalu berjalan dengan baik, karena dalam proses kebijakan selalu ada kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dengan apa yang ingin dicapai. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berperan dalam program pengendalian banjir yang prosesnya dibagi menjadi empat tahap; 1)Perumusan, 2)Pelaksanaan, 3)Pengawasan dan 4)Evaluasi program pengendalian banjir di Kota Samarinda. Dalam menjalankan program pengendalian banjir, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga menghadapi hambatan yaitu alih fungsi lahan pertanian dan hutan menjadi kawasan permukiman dan pertambangan; dan hilangnya ruang terbuka hijau yang menjadi daerah resapan dan penopang penanggulangan banjir yang dimanfaatkan untuk penggunaan lahan kawasan terbangun.

Kata Kunci: *Peran, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, pengendalian, banjir*

Pendahuluan

Indonesia terletak di dataran bumi yang sangat menguntungkan, sebab selain berada di antara dua samudera terluas di dunia, Indonesia juga memiliki iklim yang cukup menguntungkan pula, yaitu iklim tropis. Meskipun iklim tersebut membuat Indonesia memiliki udara yang cenderung panas, namun di sisi lain ada banyak hal yang diuntungkan.

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: mubarak.ipa@gmail.com

² Pembimbing I Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

³ Pembimbing II Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Dewasa ini dengan semakin meningkatnya pengurangan luas wilayah hutan akibat aktivitas pertambangan, pembukaan lahan untuk pemukiman dan kawasan industri menyebabkan terganggunya keseimbangan iklim maupun cuaca. Sehingga timbulnya pemanasan global yang menyebabkan terjadinya fenomena cuaca ekstrim serta tidak menentunya pergantian musim.

Perubahan cuaca dan iklim tersebut berdampak pula kepada aktivitas hidup masyarakat di suatu wilayah terutama di Pulau Kalimantan. Masyarakat harus bersiap dalam menghadapi perubahan-perubahan tersebut seperti bertambahnya lama musim kemarau serta bertambahnya curah hujan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 ayat 6 UU No.23 Ta.2014)

Atas dasar tuntutan tersebut sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintah di daerah, kepala daerah sebagai pimpinan pemerintah di daerah perlu didukung oleh perangkat daerah guna membantu kepala daerah. Sebagaimana disebutkan pembahasan dua poin diatas mengenai perubahan cuaca dan iklim serta kaitannya dengan otonomi daerah yaitu bagaimana pemerintah daerah melakukan tugas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta evaluasi dalam hal menghadapi perubahan cuaca dan iklim sehingga dapat mempercepat pencapaian tujuan mensejahterakan masyarakat di wilayah pemerintahannya,

Samarinda sebagai Ibu Kota Kalimantan Timur yang saat ini tengah berkembang dengan pesat, namun di tengah perkembangan ini Kota Samarinda masih selalu didera dengan permasalahan banjir. Fenomena kejadian banjir saat ini tidak hanya terjadi pada saat musim penghujan namun pada saat terjadi hujan dengan durasi 3 jam saja sudah dapat mengakibatkan banjir. Kondisi yang demikian ini sangat mengganggu aktivitas warga Kota Samarinda,

Berbagai upaya telah dilakukan, namun upaya tersebut belum optimal dalam mengatasi masalah banjir. Upaya tersebut berupa pemeliharaan saluran drainase kota, pembenahan sungai-sungai yang melintasi kota, berbagai studi terkait pengendalian banjir kota, pembangunan sarana pengendali banjir serta beberapa aturan telah dikeluarkan untuk pengendalian banjir. Upaya-upaya tersebut ternyata kalah cepat dengan perkembangan kota. Oleh sebab itulah maka diperlukan suatu penataan terpadu pengendalian banjir dengan menyusun prioritas penanganan dan pembiayaan sesuai dengan kondisi aktual serta prediksi pembangunan masa mendatang.

Dalam hal mencegah serta mengurangi dampak negatif dari perubahan cuaca dan iklim yaitu panas ekstrim di musim kemarau yang dapat menghambat produktifitas di sektor pertanian dan terutama banjir di musim penghujan.

Pemerintah Kota Samarinda membuat satuan kerja yang salah satunya bertugas mengendalikan banjir yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, untuk itu saya tertarik untuk mengkaji dalam bentuk skripsi yang berhubungan dengan peran dalam pelaksanaan dan perbantuan tugas kepala daerah. Maka disusunlah skripsi dengan judul “Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Terhadap Pengendalian Banjir Di Samarinda”

Kerangka Dasar Teori

Teori Perencanaan

Menurut Tarigan (2008:1) mengatakan perencanaan adalah menetapkan suatu tujuan dan memilih langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Kamus Management Moekijat dalam Tarigan (2008:4):

- 1) Perencanaan adalah hal memilih dan menghubungkan fakta-fakta serta hal yang membuat dan menggunakan dugaan-dugaan mengenai masa yang akan datang dalam hal ini menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan, yang dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan
- 2) Perencanaan adalah suatu usaha untuk membuat suatu rencana tindakan, artinya menetapkan apa yang dilakukan, siapa yang melakukan, dan dimana hal itu dilakukan
- 3) Perencanaan adalah penentuan suatu arah tindakan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan
- 4) Perencanaan adalah suatu penentuan sebelumnya dari tujuan-tujuan yang diinginkan dan bagaimana tujuan tersebut dicapai

Teori Peran

Peran menurut Soekanto (2009:212) adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.

Sedangkan menurut Merton dalam Raho (2007:67) mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu.

Selanjutnya Menurut Dougherty & Pritchard tahun 1985 dalam Bauer (2003:55) teori peran ini memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi. Mereka menyatakan bahwa peran itu “melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan” (hal.143).

Konsep Pengendalian

Strong dalam Hasibuan (2005:41) pengendalian adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan agar sesuai dengan ketetapan- ketetapan dalam rencana.

Menurut Harold dalam Hasibuan (2005:41) pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan dapat terselesaikan.

Konsep Banjir

Banjir merupakan suatu bagian dari siklus hidrologi, yaitu ketika jumlah air dari kawasan danau, sungai maupun laut memasuki atau merendam daratan. Volume air dipengaruhi oleh curah hujan, cuaca, musim dan salju yang mencair. Banjir dalam situasi normal akan surut dengan sendirinya, merupakan siklus normal alam. Tetapi perubahan-perubahan bentuk dan situasi alam yang disebabkan oleh manusia yang menimbulkan berbagai dampak lain dari banjir. Perubahan kawasan resapan air menjadi pemukiman, kawasan industri dan menghilangkan fungsi awal kawasan tersebut menyebabkan banjir berubah menjadi bencana.

Penyebab Banjir

Penyebab banjir menurut Robert (2002:45) terbagi menjadi 2 (dua) yaitu banjir secara alami dan banjir yang disebabkan oleh aktifitas manusia, adalah sebagai berikut:

- 1) Penyebab banjir secara alami
 - a. Curah hujan karena beriklim tropis, Indonesia mempunyai dua musim sepanjang tahun, yakni musim penghujan yang umumnya terjadi antara bulan Oktober –Maret dan musim kemarau yang umumnya terjadi antara bulan April-September. Pada musim penghujan, curah hujan yang tinggi berakibat luapan permukaan air pada aliran sungai yang akan naik hingga daratan
 - b. Erosi di pinggir daerah aliran sungai (DAS) yang menyebabkan jatuhnya tebing-tebing permukaan kedalam sungai yang berakibat terhadap pengurangan kapasitas penampungan sungai
 - c. Sedimentasi di dasar DAS berpengaruh terhadap pengurangan kapasitas penampungan sungai
 - d. Kapasitas drainase kota yang tidak memadai ketika menghadapi debit air hujan di musim penghujan
 - e. Pengaruh air pasang. Air pasang laut memperlambat aliran sungai ke laut. Pada waktu banjir bersamaan dengan air pasang yang tinggi maka ketinggian banjir menjadi besar karena terjadi aliran balik (*backwater*). Fenomena genangan air pasang (*rob*) juga menjadi rentan terjadi di daerah pesisir sepanjang tahun.

- 2) Penyebab banjir oleh aktifitas manusia
 - a. Perubahan kondisi daerah aliran sungai (DAS). Adanya aktifitas penebangan hutan, usaha pertanian yang kurang tepat, perluasan kota, dan perubahan tata guna lainnya dapat memperburuk masalah banjir karena meningkatnya aliran air
 - b. Kawasan kumuh dan sampah perumahan kumuh di sepanjang bantaran sungai dapat menjadi penghambat aliran air sungai. Hal ini biasa dijumpai di kota-kota besar
 - c. Drainase lahan, drainase kota dan pengembangan lahan pertanian pada daerah bantaran banjir akan mempengaruhi kemampuan menampung debit air yang tinggi
 - d. Kerusakan bangunan pengendali banjir. Pemeliharaan yang kurang memadai sehingga tidak berfungsinya bangunan pengendali banjir
 - e. Perencanaan sistem pengendalian banjir yang tidak tepat.
 - f. Rusaknya hutan (hilangnya vegetasi alam). Penebangan hutan oleh masyarakat secara liar (illegal logging), sistem bertani berpindah-pindah dan permainan reboisasi hutan untuk bisnis dan sebagainya.

Berdasarkan pengamatan, bahwa banjir disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor alam dan faktor aktivitas manusia. Faktor alam dipengaruhi oleh musim hujan, curah hujan, air pasang, fisiografi, erosi tebing aliran sungai dan sedimentasi aliran air. Sedangkan faktor aktivitas manusia meliputi aktivitas pembuangan sampah di daerah aliran sungai (DAS), dialihkannya fungsi hutan dan tanah resapan air menjadi pemukiman masyarakat, dan perencanaan pengendalian banjir yang tidak tepat.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Kota Samarinda yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Samarinda. Dasar penjabaran tugas, fungsi dan tata kerja struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda adalah Peraturan Wali Kota Nomor 25 tahun 2016, tanggal 21 oktober 2016 tentang “penjabaran tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda”. memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- 1) Tugas
 - a. Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan konkuren bidang pekerjaan umum dan tata ruang yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - b. Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah

2) Fungsi

- a. Perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang meliputi bina marga, cipta karya, sumber daya air, jasa konstruksi, dan tata ruang;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang meliputi bina marga, cipta karya, sumber daya air, jasa konstruksi, dan tata ruang;
- c. Pelaksanaan evaluasi di bidang pekerjaan umum dan tata ruang meliputi bina marga, cipta karya, sumber daya air, jasa konstruksi, dan tata ruang;
- d. Pengawasan dan pengendalian bidang pekerjaan umum dan tata ruang;
- e. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait tugas dan fungsi

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif bertujuan memberikan penjelasan dari variabel yang diteliti. Menurut Moelong (2006:11) mengemukakan bahwa, deskriptif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka, dari pendapat ini dijelaskan penelitian deskriptif untuk mendapatkan data yang mungkin berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, foto, video tape, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti perlu menetapkan apa yang menjadi fokus penelitian yang bertujuan mempermudah dalam mengambil data dan kemudian diproses sehingga terciptanya kesimpulan. Fokus dalam penelitian diarahkan kepada empat poin utama yaitu:

- 1) Perumusan program pengendalian banjir
- 2) Pelaksanaan program pengendalian banjir
- 3) Pengawasan program pengendalian banjir
- 4) Pelaksanaan evaluasi program pengendalian banjir

Hasil Penelitian

Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terhadap Pengendalian Banjir Kota Samarinda

Perumusan Program Pengendalian Banjir

Pada awal pembahasan mengenai perumusan program pengendalian banjir, peneliti melakukan wawancara terhadap informan kunci, Bapak Darmadi, ST. mengenai mengapa diperlukan proses perumusan program pengendalian banjir. Kemudian informan kunci memberikan penjelasan bahwa “Berdasarkan permasalahan yang dihadapi serta memperhatikan hasil telaahan dan analisis maka dirumuskan isu-isu strategis Dinas PUPR Kota Samarinda :

1. Belum efektifnya pemberdayaan SDM dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

2. Tingginya moda transportasi yang tidak diimbangi dengan jaringan jalan dan jembatan yang ada.
3. Meningkatnya jumlah titik banjir.
4. Belum dikendalikannya lahan pertanian sesuai Perda RTRW.
5. Belum maksimalnya pelayanan publik.
6. Lambatnya upaya untuk percepatan penyediaan prasarana dan sarana penyehatan lingkungan dan persampahan Kota Samarinda.
7. Cakupan air bersih belum melayani seluruh kota.
8. Kurangnya dokumen penataan bangunan.
9. Belum optimalnya implementasi dan pelaksanaan undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang”.

Bencana banjir merupakan fenomena alam yang terjadi akibat intensitas curah hujan yang tinggi. Intensitas tinggi tersebut disebabkan oleh tidak tertampungnya limpasan air permukaan oleh jaringan pematuan suatu wilayah. Kondisi tersebut berdampak pada timbulnya genangan di wilayah tersebut yang dapat meresahkan masyarakat. Bencana banjir di Indonesia sendiri merupakan jenis bencana yang paling sering terjadi. Kota Samarinda merujuk dari RTRW tahun 2014-2034 termasuk memiliki kerentanan terhadap banjir. Hal tersebut dikarenakan kondisi kota Samarinda yang rentan, dimana topografinya cenderung landai. Selain itu, curah hujan di Kota Samarinda tergolong tinggi. Kondisi tersebut meningkatkan risiko bencana banjir khususnya banjir permukaan dan genangan di beberapa titik jalan. Hal tersebut diperparah dengan kondisi drainase di Kota Samarinda yang belum memadai dan masih banyaknya sampah diparit-parit sehingga menghambat aliran air jika terjadi banjir/genangan.

Proses perencanaan pembangunan melalui usulan yang dimulai dari masyarakat, pemerintah tingkat kelurahan, kecamatan, LSM dan internal pemerintahan, lalu ke Dinas PUPR yang dibahas di Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) yang biasanya dilakukan setahun sekali. Hasil dari Musrenbang akan diajukan dan dibahas Dinas PUPR ke dan/atau bersama Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan). Lalu hasil dari keputusan dibahas bersama panitia anggaran (SEKDA, BAPPEDA, penyusun program Dinas PUPR). Kemudian dibuat skala prioritas program yang menghasilkan keputusan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA). Selanjutnya RKA diajukan oleh Sekda ke DPRD untuk disaring kemudian ditetapkan dan disahkan dalam anggaran daerah.

Perencanaan program pengendalian banjir masuk dalam isu-isu strategis RKA Dinas PUPR dan dapat digambarkan tujuan dan sasaran agenda prioritas 1 yaitu Optimalisasi pengendalian banjir sebagai berikut :

tujuan : Mewujudkan Kota Samarinda bebas banjir.

sasaran : Terlaksananya pengendalian banjir

1) Program Teknis,

Merupakan program-program Kementerian PU dan Perumahan Rakyat yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran /

masyarakat (pelayanan eksternal) (dasar Permen PU no.6 tahun 2017), yaitu:

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air meliputi kegiatan-kegiatan:
 1. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya
 2. Pembinaan Penatagunaan SDA
 3. Pembinaan Program dan Anggaran
 4. Pembinaan Waduk, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
 5. Pembinaan Konservasi, Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi, dan Pengamanan Darurat Akibat Bencana
 6. Dukungan Manajemen DSDAN
 7. Pembinaan Keamanan Bendungan
 8. Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Waduk, Embung, Situ, serta Bangunan Penampung Air Lainnya
 9. Konservasi, Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi, dan Pengamanan Pantai
 10. Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku dan Air Tanah
 11. Pembangunan Dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Rawa dan Tambak
 12. Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA
 13. Peningkatan Tata Kelola Pengelolaan SDA Terpadu

Selaras dengan program Kementerian PU diatas, Dinas PUPR Kota Samarinda pun harus bertindak sebagai perpanjangan tangan Kementerian PU di daerah/kota. Guna percepatan pencapaian fungsi dan tujuan pembangunan di daerah/kota.

Peneliti melakukan wawancara mengenai dasar perumusan program pengendalian banjir “apakah ada standar dalam perumusan perencanaan program pengendalian banjir” yang ditujukan kepada informan kunci, Bapak Darmadi, ST, beliau menyampaikan:

“Standar dalam perumusan yaitu Permen PU no.6 tahun 2017 selanjutnya diadaptasi dan dimusyawarahkan dalam musrenbang. Dinas PUPR memiliki program perencanaan yang dituangkan dalam bentuk Rencana Strategi tahun 2017-2021. Yang mana selama lima tahun tersebut harus memiliki program perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Dinas PUPR sudah melakukan perencanaan program pengendalian banjir”

Pelaksanaan Program Pengendalian Banjir

Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan program pengendalian banjir yang dilakukan oleh Dinas PUPR, peneliti melakukan wawancara dengan menanyakan apakah ada bentuk pelaksanaan dan bagaiman bentuk pelaksanaan program

pengendalian banjir, kemudian informan kunci memaparkan seperti yang disampaikan kepala bidang pelaksana jaringan sumber air, Bapak Darmadi, S.T :

“Pelaksanaan pengendalian banjir yang kami lakukan adalah membangun, meningkatkan, dan memelihara jaringan sumber air untuk optimalisasi pengendalian banjir”

Dari wawancara diatas, bentuk pelaksanaan pengendalian banjir yaitu membangun, meningkatkan, dan memelihara jaringan sumber air. Membangun berarti menciptakan/mengadakan jaringan sumber air untuk pengendalian banjir yang sebelumnya tidak/belum ada. Meningkatkan berarti jaringan sumber air untuk pengendalian banjir yang sudah ada diperbaiki agar lebih optimal. Sedangkan memelihara jaringan sumber air berarti menjaga infrastruktur pengendali banjir agar selalu bekerja optimal.

Kota Tepian merupakan Semboyan Kota Samarinda yang merupakan Akronim dari Teduh, Rapi, Aman dan Nyaman adalah daerah tepi sungai, bagian kota yang berbatasan dengan air. Kota tepian yang dimaksud untuk mengembangkan wilayah Kota Samarinda dengan acuan *waterfront city development* (konsep pengembangan daerah tepian air baik itu tepi pantai, sungai ataupun danau) karena selain mengoptimalkan lahan juga dapat menjadi area pariwisata.

Langkah yang dilakukan oleh Dinas PUPR dalam pelaksanaan program yaitu dengan melakukan lelang/pengadaan pelaksanaan kepada para kontraktor, lelang yang dilakukan Dinas PUPR untuk mendapatkan pemenang proyek pembangunan dimana pemenang proyek harus siap melaksanakan program pengendalian banjir berdasarkan SPMK (Surat Perintah Memulai Kerja), dan harus berdasarkan rencana dan selesai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Program prioritas merupakan bentuk instrumen kebijakan yang terdiri dari satu atau lebih kegiatan pembangunan daerah. Kegiatan ini mendapat prioritas dalam pendanaan untuk melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan kegiatan sehingga pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan daerah dapat terwujud.

Pendanaan indikatif merupakan rancangan maksimal atas rencana belanja atau anggaran yang akan dituangkan dalam APBD. Pendanaan indikatif dialokasikan ke setiap program prioritas masing-masing urusan untuk mencapai target setiap indikator kinerja utama Dinas PUPR yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pengelompokan pendanaan pada program dan kegiatan dalam menyelenggarakan kegiatan prioritas selama 5 (lima) tahun ke depan.

Target rencana strategis Dinas PUPR dalam program pengendalian banjir menganggarkan dana sebesar Rp340.234.076.000 pada tahun pertama renstra 2017, kemudian pada tahun kedua meningkat sebesar Rp479.500.000.000, pada tahun ketiga dibesarkan lagi menjadi Rp449.500.000, tahun keempat dan kelima anggaran dikecilkan dengan alasan finalisasi pengerjaan diperkirakan sudah berjalan lebih dari 70%, yakni masing-masing Rp361.000.000.000 dan Rp236.000.000.000 pada dua tahun terakhir.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara mengenai pelaksanaan program pengendalian banjir dengan Kepala Bidang Pelaksana Jaringan Sumber Air Dinas PUPR, Bapak Darmadi, S.T, beliau menyampaikan:

“Kegiatan pelaksanaan pengendalian banjir yaitu dengan membangun, meningkatkan, dan memelihara jaringan sumber air untuk optimalisasi pengendalian banjir, dan akan dikerjakan rencana tahunan agar segera rampung terutama di titik-titik banjir lewat”

Dari wawancara diatas, digarisbawahi bahwa pelaksanaan pengendalian banjir oleh Dinas PUPR dibagi menjadi tiga kategori yaitu membangun, meningkatkan dan memelihara jaringan sumber air untuk optimalisasi pengendalian banjir.

Pengawasan dan Pengendalian Program Pengendalian Banjir

Kinerja pelayanan Dinas PUPR Kota Samarinda terhadap pengendalian banjir di Kota Samarinda adalah program yang sudah berjalan dari dibentuknya Peraturan Walikota Nomor 25 tahun 2016. Melanjutkan kinerja pelayanan sebelumnya, kinerja dinas dapat kita lihat berjalan kearah positif. Khususnya pada pengendalian banjir yang memiliki persentase drainase sekunder dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat.

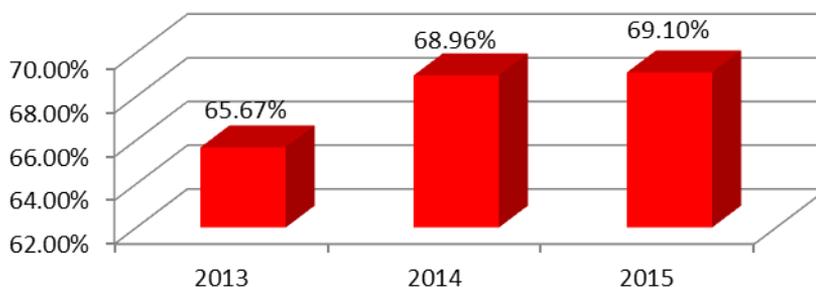
Kemudian peneliti melakukan wawancara terkait proses pengawasan dan pengendalian program pengendalian banjir serta bagaimana dan mengapa diperlukan pengendalian banjir tsb, kepada Kepala Bidang Pelaksana Jaringan Sumber Air Dinas PUPR, beliau menyampaikan:

“Tujuan pengawasan dan pengendalian adalah untuk mempertahankan kondisi infrastruktur yang telah dibangun untuk pengendalian banjir, agar sesuai dengan fungsi, meminimalisir kerusakan dan agar dapat beroperasi sesuai dengan umur yang telah direncanakan, dalam hal ini kami sebagai bidang terkait dan pada umumnya dinas PUPR yang meanggarkan dana pemeliharaan yang selanjutnya disetujui oleh DPRD”.

Dari hasil wawancara diatas, pengawasan dan pengendalian harus dilakukan setelah proses pelaksanaan pembangunan program pengendalian banjir dilaksanakan, guna menyelaraskan fungsi, meminimalisir kerusakan dan agar dapat beroperasi dalam jangka panjang.

Berdasarkan Arsip laporan tahunan Dinas PUPR, dalam kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 drainase sekunder dalam kondisi baik yang ada di Kota Samarinda masih kurang optimal. Pada tahun 2013 realisasi capaian drainase dalam kondisi baik sebesar 65,67%, pada tahun 2014 realisasi capain sebesar 68,96% dan pada tahun 2015 meningkat kembali menjadi 69,10%. Lebih rinci, drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat bisa dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar Drainase Dalam Kondisi Baik Tahun 2013-2015



sumber: arsip dinas PUPR Kota Samarinda 2016

Berdasarkan gambar diatas dapat kita lihat bahwa drainase dalam kondisi baik pada tahun 2013 berada dipoin 65,67%, tahun kedua 68,96% dan tahun 2015 pada angka 69,1%. Dapat disimpulkan bahwa kondisi drainase pada Kota Samarinda semakin tahun semakin diperbaiki dan dipelihara.

Selain itu ada pula pihak pengawas yakni Konsultan Pengawas dan beberapa pihak dari internal Dinas PUPR yang bertugas mengawasi berjalannya proyek agar tidak keluar dari target rencana dan waktu.

Pelaksanaan Evaluasi Program Pengendalian Banjir

Pada tahap evaluasi yang mana merupakan proses akhir dari siklus pembangunan infratraktur. Peneliti melakukan wawancara kepada informan kunci, Bapak Darmadi, ST mengenai bagaimana dan mengapa perlu diadakannya evaluasi serta kapan dilaksanakan dan siapa yang berperan dalam proses evaluasi tsb. Beliau menyampaikan:

“Evaluasi menjadi indikator keberhasilan dalam setiap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan kebijakan. Evaluasi dapat menjadi acuan di kemudian hari untuk dapat menghasilkan produk kebijakan yang lebih efektif dan efisien. Setiap unsur baik itu masyarakat, pihak internal atau diluar pemerintah kita tampung aspirasinya supaya bisa dikemudian hari kita membuat program yang diisi oleh ide dari banyak kepala. Evaluasi kita laksanakan setiap program telah kita kerjakan, jari tidak ada batasan waktu.”

Demikian menurut Kepala Bidang Pelaksana jaringan Sumber Air Dinas PUPR menanggapi pertanyaan dari peneliti terkait tahapan evaluasi dari setiap program kebijakan pemerintah dalam hal ini program pengendalian banjir.

Pelaksanaan evaluasi harus dilakukan untuk memantau implementasi secara regular. Secara khusus kebutuhan akan analisis daya dukung fisik kawasan Kota Samarinda dipengaruhi oleh beberapa persoalan yang sedang berkembang seperti:

- 1) Alih fungsi lahan pertanian dan hutan menjadi kawasan pemukiman dan pertambangan;

2) Ruang Terbuka Hijau (RTH) di beberapa kawasan sekitar Kota Samarinda sebagai daerah serapan dan penopang penanggulangan banjir.

Sebagian besar lahan di Kota Samarinda pada umumnya dimanfaatkan untuk penggunaan lahan kawasan terbangun seperti perumahan, pemukiman, perdagangan dan jasa, perkantoran serta fasilitas umum lainnya yang hampir tersebar di seluruh Kota Samarinda. Hal tersebut merupakan faktor penghambat dari pelayanan Dinas PUPR terkait Kajian Lingkungan Hidup Strategis karena pemukiman yang ada meliputi pemukiman kumuh, perumahan kepadatan tinggi, sedang dan rendah merupakan salah satu sisi negatif dari pola penataan ruang.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi serta memperhatikan hasil telaahan dan analisis maka dapat dirumuskan isu-isu strategis Dinas PUPR Kota Samarinda sebagai berikut :

- 1) Belum efektifnya pemberdayaan SDM dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- 2) Tingginya moda transportasi yang tidak diimbangi dengan jaringan jalan dan jembatan yang ada.
- 3) Meningkatkan jumlah titik banjir.
- 4) Belum dikendalikannya lahan pertanian sesuai Perda RTRW.
- 5) Belum maksimalnya pelayanan publik.
- 6) Lambatnya upaya untuk percepatan penyediaan prasarana dan sarana penyehatan lingkungan dan persampahan Kota Samarinda.
- 7) Cakupan air bersih belum melayani seluruh kota.
- 8) Kurangnya dokumen penataan bangunan.
- 9) Belum optimalnya implementasi dan pelaksanaan undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Indikator kinerja merupakan gambaran tingkat pencapaian suatu program, kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif mengenai apa yang diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai. Selain itu, indikator kinerja merupakan cerminan sebuah fungsi dari keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung) dimana pengukuran indikator “dampak” lebih utama daripada “hasil”, dan "hasil" itu sendiri merupakan agregasi seluruh "keluaran" dari keberhasilan kegiatan yang ada didalamnya. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang keberhasilan pembangunan dan *Good Governance* yang diharapkan di masa mendatang,

Program Pengendalian banjir berfokus pada pengurangan jumlah titik banjir di Kota Samarinda. Target pada tahun 2017 yaitu sebesar 48% jumlah titik banjir berkurang dengan anggaran sebesar Rp 418.256.245.000, dimana selama satu periode (2017-2021) direncanakan program yang berkelanjutan dengan proyeksi pengerjaan tahun jamak dengan penyempurnaan tiap tahunnya.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

- 1) Perumusan program pengendalian banjir
Dinas PUPR dalam perumusan program pengendalian banjir melihat kondisi di Samarinda dipadukan dengan usulan dari beberapa unsur di luar instansi yakni masyarakat, pemerintah tingkat kelurahan hingga kecamatan. Kemudian dibahas dalam Musyawarah Rencana Pembangunan selanjutnya disetujui oleh pemerintah eksekutif dan legislatif kemudian dituangkan dalam bentuk Rencana Strategis yang dalam pendanaannya masuk ke dalam APBD Kota Samarinda.
- 2) Pelaksanaan program pengendalian banjir
Dinas PUPR dalam pelaksanaan program pengendalian banjir berdasarkan rencana strategis lima tahunan yang dikerjakan bertahap. Dinas PUPR melaksanakan program tersebut dalam rangka perencanaan spasial dan penataan ruang wilayah kota. Pelaksanaan program dilakukan oleh pihak kontraktor pemenang proyek dan dilaksanakan berdasarkan rencana kerja, Surat Perintah Memulai Kerja, dan harus selesai dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
- 3) Pengawasan dan pengendalian program pengendalian banjir
Dinas PUPR melakukan pengawasan dan pengendalian program pengendalian banjir guna menyelaraskan fungsi, standar infrastruktur serta meminimalisir kerusakan. Pihak pengawas terdiri dari Konsultan Pengawas dan Dinas PUPR yang bertugas mengawasi berjalannya pelaksanaan program pengendalian banjir agar tidak keluar dari rencana kerja dan target pelaksanaan.
- 4) Pelaksanaan Evaluasi program pengendalian banjir
Dinas PUPR melaksanakan evaluasi program pengendalian banjir dalam rangka memantau pelaksanaan program secara reguler. Evaluasi menjadi indikator keberhasilan dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan dan pengendalian program pengendalian banjir Kota Samarinda.
Dinas PUPR juga dalam perannya menjalankan program pengendalian banjir dihambat oleh beberapa faktor yang dipengaruhi persoalan yang sedang berkembang di Kota Samarinda seperti:
 - 1) Alih fungsi lahan pertanian dan hutan menjadi kawasan pemukiman dan pertambangan;
 - 2) Hilangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) di beberapa kawasan sekitar Kota Samarinda sebagai daerah resapan dan penopang penanggulangan banjir yang dimanfaatkan untuk penggunaan lahan kawasan terbangun seperti perumahan, pemukiman, perdagangan dan jasa, perkantoran serta fasilitas umum lainnya.
Hal tersebut merupakan faktor penghambat dari pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terkait pelaksanaan program

pengendalian banjir karena pemukiman yang ada meliputi pemukiman kumuh, perumahan kepadatan tinggi, sedang dan rendah merupakan salah satu sisi negatif dari pola penataan ruang.

Saran

- 1) Sosialisasi kepada setiap elemen masyarakat, swasta agar bersama menjaga kondisi lingkungan dan mendukung penuh terhadap peran dinas PUPR dalam menjalankan program pengendalian banjir
- 2) Membuat rencana pembangunan jangka panjang yang konsisten dalam hal pengendalian banjir, agar masalah banjir tidak dipandang seperti masalah yang dapat diatasi secara instan. Dikarenakan masalah banjir erat kaitannya dengan kondisi lingkungan dan pola hidup masyarakat sekitarnya.

Daftar Pustaka

- Bauer, Jeffrey C. (2003). *Role Ambiguity and Role Clarity: A Comparison of Attitudes in Germany and the United States*. Dissertation, University of Cincinnati, Clermont.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Revisi*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Raho. Bernard, 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Prestasi Pustakaraya. Jakarta
- Robert L. Mathis dan John H. Jackson. 2002, *Manajemen Sumber Daya Manusia; Buku 2*, Alih Bahasa: Salemba Empat. Jakarta
- Soerjono Soekanto. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru*. Rajawali Pers. Jakarta
- Tarigan, Robinson, 2008, *Perencanaan Pembangunan Wilayah, Edisi Revisi Kedua*, PT Bumi Aksara, Jakarta
- McIntosh, K. L.; William Bauer, 2006. *Working Mothers vs Stay At Home Mothers: The Impact on Children*. Marietta College.

Dokumen:

- Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. Sekretariat Negara. Jakarta
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 2016. *Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Umum 2017-2021 Kota Samarinda*. Samarinda.